



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128  
TELEPON : 0251-8322185 FAKSIMILE : 0251- 8380588  
Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : [bsip.nakeswan@pertanian.go.id](mailto:bsip.nakeswan@pertanian.go.id)

Nomor : B-119/HM.130/H.5/01/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan

31 Januari 2024

Yth. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama  
Kementerian Pertanian  
di  
Jakarta

Berkenaan dengan surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Pertanian Nomor:B-298/HM.130/A/01/2024 tentang Pemenuhan Kewajiban PPID, bersama ini disampaikan Laporan Tahunan PPID Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,



Dr. drh. Agus Susanto, M.si  
NIP 197102012002121002

# LAPORAN AKHIR TA 2023



## PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (PSIPKH) TAHUN 2023



<http://peternakan-litbang-ppid.pertanian.go.id>

**Pejabat PPID:**  
Hasanatul Hasinah, S.Pt, M.P  
**Penulis:**  
Bayu Arta Ramadhan, S.pt

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID PSIPKH yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Tim PPID PSIPKH juga telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga memperoleh penghargaan dari PPID Utama Kementerian Pertanian RI sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2023 dengan mendapatkan peringkat ke-6.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik PSIPKH oleh seluruh pegawai PSIPKH.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bogor, 03 Januari 2024  
Kepala Pusat  
Selaku Atasan Langsung  
PPID Pembantu Pelaksana PSIPKH

Dr. drh. Agus Susanto, M.Si  
NIP. 197102012002121002

## DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
DAFTAR TABEL .....	5
PENDAHULUAN .....	6
LAPORAN AKHIR PPID .....	7
1. Sekilas PPID Unit Kerja .....	7
2. Regulasi Terkait PPID .....	9
3. Program dan Kegiatan PPID PSIPKH .....	10
a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen .....	10
b. Penyusunan Daftar Informasi Publik Yang dikuasai PSIPKH .....	10
c. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik PSIPKH TA 2023 ..	11
d. <i>Public hearing</i> Standar Pelayanan Publik Lingkup PSIPKH .....	12
e. Rapat Koordinasi Pengisian <i>Self Assesment Question (SAQ)</i> PSIPKH .....	13
f. Penilaian KIP, Visitasi dan Wawancara Badan Publik Informatif .....	14
g. Rapat Koordinasi PPID Lingkup Kementan dan Penganugerahan KIP 2023 .....	16
4. Maklumat Layanan PPID PSIPKH .....	18
5. SDM dan Anggaran PPID PSIPKH .....	19
6. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	21
7. Laporan Informasi Publik PSIPKH TA 2023 .....	26
a. Rekapitulasi Permohonan PPID .....	26
b. Rekapitulasi Waktu Pelayanan dan Jam Pelayanan Informasi Publik .....	28
c. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Keberatan .....	29
d. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan .....	29
e. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia Dan Pekerjaan .....	30
f. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan ...	30
8. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi .....	30
9. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi .....	31
10. Rencana Kegiatan PPID PSIPKH Tahun 2024 .....	32
PENUTUP .....	33

## DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1. Dokumen Penetapan DIP PSIPKH TA 2023.....	11
Gambar 2. Penandatanganan Komitmen KIP PSIPKH Tahun 2023.....	12
Gambar 3. Public Hearing Lingkup PSIPKH Tahun 2023.....	13
Gambar 4. Rapat Koordinasi Penilaian SAQ TA 2023 Lingkup Kementan .....	14
Gambar 5. Hasil Penilaian Tahap I SAQ Lingkup Kementan.....	15
Gambar 6. Visitasi dan Wawancara Badan Publik Informatif PSIPKH TA 2023.....	16
Gambar 7. Pemeringkatan dan Malam Penganugerahan KIP Lingkup Kementan.....	18
Gambar 8. SK Kepala PSIPKH Tim Pendukung PPID PSIPKH TA 2023 .....	20
Gambar 9. Petugas yang ramah dan sigap PSIPKH .....	20
Gambar 10. Alokasi Anggaran PPID PSIPKH TA 2023.....	21
Gambar 11. Ruang Layanan Informasi Publik PSIPKH .....	22
Gambar 12. Counter Desk Informasi Layanan Publik.....	22
Gambar 13. Maklumat Pelayanan Serta Papan Informasi Digital PSIPKH .....	23
Gambar 14. Ruang Baca Perpustakaan dan loker pengunjung PSIPKH.....	23
Gambar 15. Sarana sanitasi dan <i>hygiene</i> di seluruh area PSIPKH.....	23
Gambar 16. Sarana dan Prasarana Ramah Disabilitas di PSIPKH .....	24
Gambar 17. Peralatan dan petunjuk saat terjadi bencana alam .....	25
Gambar 18. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik PSIPKH TA 2023 .....	25
Gambar 19. Sertifikat dan Penghargaan yang Telah diraih PSIPKH .....	26
Gambar 20. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik TA 2023 .....	27
Gambar 21. Waktu Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementan.....	29
Gambar 22. Rekapitulasi Nihil Waktu Pelayanan Keberatan .....	29
Gambar 23. Rekapitulasi Nihil Penolakan Permohonan .....	29
Gambar 24. Rekapitulasi Nihil Pemohon Informasi Berdasarkan Usia Dan Pekerjaan.....	30
Gambar 25. Rekapitulasi Nihil Permohonan IP Berdasarkan Pengelompokan .....	30

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Informasi Permohonan Informasi Publik.....	hal 26
Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan IP Satker Lingkup PSIPKH.....	27

## PENDAHULUAN

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan menurut dasar hukum UUD 1945 Pasal 28 F. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Setiap orang berhak dalam memperoleh informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik.

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1 Tahun 2022 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian

Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan sebagai acuan seluruh PPID Pelaksana di seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian terutama untuk :

1. memberikan standar layanan sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Badan Litbang Pertanian dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

## **LAPORAN AKHIR PPID**

### **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA DAN PELAKSANA UPT PSIPKH TAHUN 2023**

#### **1. Sekilas PPID Unit Kerja**

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sebagai kewajiban negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945. Guna menjamin hak warga Negara tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU tersebut, setiap Badan Publik termasuk Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Kesadaran publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik setiap Badan Publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hal ini sesuai Pasal 13, UU Nomor 14 Tahun 2008.

Badan Publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi maka PPID Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) membuat pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2023. PPID Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) juga mencatat permohonan informasi selama tahun 2023 yang terkait informasi peternakan sesuai tuisi Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH). Dalam laporan tersebut digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi SDM, sarana prasarana sampai dengan gambaran kuantitatif permohonan informasi dan pengaduan publik.

PSIPKH sebagai salah satu Badan Publik wajib memberikan kemudahan akses informasi sesuai UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tim PPID PSIPKH juga sudah dibentuk sesuai Surat Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen



Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 25.4/Kpts/HM.130/H.5/06/2023 tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 32/Kpts/HM.130/H.5/09/2023 tentang **Perubahan** Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 25.4/Kpts/HM.130/H.5/06/2023 tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023.

Adapun tugas dari PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT adalah:

- a) Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
  - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - Informasi yang dikecualikan.
- b) Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup PSIPKH;
- c) Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup PSIPKH;
- d) Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa dan pelayanan informasi publik;
- e) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- f) Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian;

Jenis-Jenis Informasi Publik :

- a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan;
- b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan;
- c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan;

- d) Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian.

Sesuai dengan tugas dan fungsi PPID diatas, seluruh badan publik Lingkup PSIPKH diwajibkan dapat menyiapkan akses informasi bagi khalayak dalam kaitannya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **2. Regulasi Terkait PPID**

Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik mengacu pada :

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- d) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
- e) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
- f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
- g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Uji Konsekuensi
- h) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
- i) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1 Tahun 2022 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian
- j) Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2508 Tahun 2021 tentang Penunjukan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Kementerian Pertanian
- k) Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2297 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konten Situs Web Lingkungan Kementerian Pertanian
- l) Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

### 3. Program dan Kegiatan PPID PSIPKH

#### a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Dokumen terkait informasi publik di tahun 2023 telah dikumpulkan dan ditampilkan di situs web PSIPKH melalui alamat <https://nakeswan.bsip.pertanian.go.id/> beberapa informasi yang telah dicantumkan antara lain:

- Kebijakan strategis : Visi, misi, tujuan dan sasaran, target utama dan renstra 2010-2014 dan Renstra 2015-2019; 2020-2024;
- LAKIP/LAKIN 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, dst;
- Laporan Tahunan 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, dst;
- LHKPN dan LHKASN 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, dst;
- Laporan Keuangan 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, dst;
- Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, dst;
- Laporan PPID PSIPKH 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, dst;
- Laporan Pengaduan Masyarakat 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, dst;

#### b. Penyusunan Daftar Informasi Publik Yang dikuasai PSIPKH

Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) masih terus dilakukan berkoordinasi dengan Kelompok Kerja lain di PSIPKH. DIP yang telah disusun secara lengkap telah ditampilkan pada situs web PSIPKH melalui alamat <http://www.peternakan.litbang.pertanian.go.id> dan telah diupload di portal PPID PSIPKH dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/ HM.130/5/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.dan diperkuat oleh Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.



No	Jenis Informasi	Kejelasan Isi Informasi	Publik/Partisipatif yang Berpengaruh	Penganggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Beberapa Informasi yang Tersedia	Angka Nilai Kepercayaan/Relevansi	Kualitas Informasi (Relevansi)
1	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Publik	Struktur Organisasi	Agar, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	1 Tahun	100	
2	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Publik	Struktur Organisasi	Agar, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	1 Tahun	100	
3	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Publik	Struktur Organisasi	Agar, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	1 Tahun	100	
4	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Publik	Struktur Organisasi	Agar, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	1 Tahun	100	
5	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Publik	Struktur Organisasi	Agar, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	1 Tahun	100	
6	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Publik	Struktur Organisasi	Agar, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	1 Tahun	100	
7	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Publik	Struktur Organisasi	Agar, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	1 Tahun	100	

Program Kegiatan Kelembagaan										
1	Jalur Utama	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
2	Jalur dan Inovasi Baru	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
3	Program Kerja	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
4	SPK	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
A. Kegiatan										
1	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
2	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
B. Kegiatan										
1	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
2	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
3	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
C. Kegiatan										
1	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
2	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
3	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
D. Kegiatan										
1	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
2	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
E. Kegiatan										
1	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
2	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
F. Kegiatan										
1	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
2	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
G. Kegiatan										
1	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
2	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
H. Kegiatan										
1	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM
2	Salah T. Usaha	Tugas dan tanggung jawab program kerja tahunan	Puslithbang	Salah T. Usaha Kebang. Program	Rapor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0	0	0	1 Tahun	SM

B. Informasi Serta Merta									
1	Jalur Evaluasi	Jalur evaluasi penyelesaian apabila terjadi bencana alam	Puslithbang	Kebag Tata Usaha	Rapor, 2019, 2020, 2021, 2022	✓	Selama Masih Berlaku	SM	
2	Perubahan Jam Layanan selama Pandemi Covid-19	Jam Layanan Puslithbang selama Pandemi Covid-19 dan Selama Bulan Ramadhan	Puslithbang	Kebag Tata Usaha	Rapor, 2019, 2020, 2021, 2022	✓	Selama Masih Berlaku	SM	
3	Titik Kumpul	Titik kumpul apabila ada bencana alam	Puslithbang	Kebag Tata Usaha	Rapor, 2019, 2020, 2021, 2022	✓	Selama Masih Berlaku	SM	

Keterangan :  
- BK : Berkala  
- BS : Setiap Saat  
- SM : Serta Merta  
- DK : Dikecualikan

Bogor, 11 Juli 2022  
Melaporkan,  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Puslithbang Perternakan,  
Dr. Aneli Simah, M.Si  
NIP. 196804181996032001

Gambar 1. Dokumen Penetapan DIP PSIPKH TA 2023

### c. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik PSIPKH TA 2023

Mendukung Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian, PSIPKH telah melaksanakan kegiatan penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik oleh pegawai PSIPKH yang diwakili dari masing-masing jabatan struktural maupun fungsional. Kegiatan penandatanganan keterbukaan KIP dilaksanakan pada tanggal 4 September 2023 di lapangan upacara PSIPKH saat Apel Pagi.

Kegiatan penandatanganan dihadiri dan disaksikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Amanat yang disampaikan dalam kegiatan tersebut yakni Kementerian Pertanian saat ini akan melangsungkan penilaian *Self Assesment Questionnaire* (SAQ). Adapun penilaian tersebut meliputi penilaian terhadap Komitmen pimpinan dalam mendukung keterbukaan informasi publik antara lain Penandatanganan nota komitmen, Ketersediaan Anggaran, Kelengkapan sarana dan prasarana (konter layanan PPID, komputer, keterangan waktu layanan, dll), Kehadiran pimpinan dalam kegiatan PPID, serta Kepatuhan dalam penyusunan dan pelaporan DIP, laporan bulanan dan laporan tahunan.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Kepala PSIPKH, Kepala Tata Usaha yang juga Pejabat Pembuat Komitmen PSIPKH, koordinator dan sub koordinator serta penanggung jawab

kegiatan lingkup PSIPKH, Perwakilan pejabat fungsional tertentu, pejabat administrasi umum, Pengelola keuangan dan Petugas PPID PSIPKH.



Gambar 2. Penandatanganan Komitmen KIP PSIPKH Tahun 2023

#### d. **Public hearing Standar Pelayanan Publik Lingkup PSIPKH**

Kegiatan *public hearing* di Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan pada hari Jum'at, 24 November 2023 yang dilaksanakan secara *hybrid* bersamaan dengan pelaksanaan *public hearing* UPT lingkup PSIPKH (LPSI RB dan LPSI RK). Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Calliandra/ruang rapat Aula PSIPKH yang dihadiri oleh perwakilan seluruh satker Lingkup BSIP Kementan, Kementerian/Lembaga, pemerintah lokal/setempat, institusi pendidikan, *stakeholder* dan masyarakat umum lainnya sesuai dengan surat undangan *public hearing* SPP Nomor B-902/HM.130/H.5/11/2023 tanggal 17 November 2023.

Kegiatan *public hearing* PSIPK turut mengundang Narasumber Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Biro OK) Kementan Drs. Zulkifli dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia yang dihadiri oleh Andi, SH., MM. Kepala Biro OK Kementan dalam kesempatannya tersebut menyampaikan Kredibilitas sebuah negara bisa diukur dari tindak lanjut dari standar pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik harus selalu mengedepankan visi Pelayanan Publik mencakup Percepatan pelayanan publik, efisiensi pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas pelayanan.

Paparan Kedua disampaikan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Andi, SH., MM.) yang dalam paparannya berjudul Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Publik PSIPKH. SPP adalah salah satu mitigasi untuk mencegah penyimpangan, pungli, dan pelayanan yang tidak jelas. SPP adalah kewajiban instansi untuk mensosialisasikan dan mengedukasi publik. Public Hearing hak masyarakat dan kewajiban bagi instansi untuk mensosialisasi dan desiminasi. UU No. 25 Tahun 2019 sebagai UU penyambung dari semua Undang-undang bagaimana pelayanan harus dilakukan. Pelayanan public meliputi 3 (tiga) jenis antara lain: *Good public*, *Service public* dan *Administrative public*.



Gambar 3. Public Hearing Lingkup PSIPKH Tahun 2023

#### e. Rapat Koordinasi Pengisian *Self Assesment Question (SAQ)* PSIPKH

Kementerian Pertanian melalui Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) Kementan menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi pengisian SAQ TA 2023 lingkup Kementan. Kegiatan dilaksanakan secara daring menggunakan *zoom meeting* yang dihadiri oleh seluruh petugas PPID lingkup Kementan. Rapat koordinasi pengisian SAQ dilaksanakan pada Jumat, 11 Agustus 2023 dihadiri oleh pejabat PPID PSIPKH beserta petugas PPID.

Rapat dibuka oleh Ketua kelompok pengelolaan informasi publik Erwin Zulkarnaen dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam mendukung keterbukaan informasi publik perlu dilakukan update informasi publik pada website masing-masing unit kerja. Mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023, seluruh unit kerja diharapkan menyampaikan informasi terkait barang dan jasa ke Biro Humas Kementan sebagai evidence penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat; Informasi barang dan jasa yang disampaikan akan disampaikan ke Biro Humas Kementan yakni pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit kerja contohnya pengadaan benih, pengadaan sapi atau pengadaan alat-alat laboratorium dll.

Sekretaris Jenderal Kementan melalui Biro Hubungan Masyarakat rutin melaksanakan kegiatan pengisian SAQ 2023 lingkup Kementan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi PPID Utama ke seluuh unit kerja lingkup Kementan dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Selain itu kegiatan ini dilaksanakan sebagai pemberian reward untuk PPID unit kerja UPT maupun lingkup yang telah berkinerja dengan

baik. Kanal Website, media sosial, dan portal PPID merupakan salah satu instrumen penilaian kegiatan SAQ yang akan dinilai pada tahun 2023 dengan salah satu syarat bahwa kriteria Penilaian Website aktif dan memiliki domain xxx.pertanian.go.id.

Kegiatan pengisian SAQ direncanakan akan dimulai pada bulan September 2023 – Oktober 2023 (selama 1 bulan). Waktu yang diberikan PPID Utama dirasa cukup untuk masing-masing satker melengkapi evidence yang wajib dijawab dan diupload pada link penilaian SAQ 2023 Kementan melalui <https://monev-ppid.pertanian.go.id/>. Dalam rangka penilaian PPID Utama Kementan telah menyiapkan 2 Form untuk penilaian yakni form penilaian SAQ dan form penilaian website.



Gambar 4. Rapat Koordinasi Penilaian SAQ TA 2023 Lingkup Kementan

#### **f. Penilaian KIP, Visitasi dan Wawancara Badan Publik Informatif**

Kegiatan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup kementan TA 2023 telah selesai dilaksanakan penilaian tahap pertama yaitu penilaian melalui formulir *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) dan situs web oleh tim verifikator terhadap 120 PPID UK/UPT Lingkup Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan surat Plt. Sekretaris Jenderal Selaku Atasan PPID Utama kementerian Pertanian Nomor B-3734/HM.130/A/11/2023 tanggal 2 November 2023 hal Hasil Penilaian

Tahap Pertama Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023, Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) mendapatkan **peringkat ke III dengan predikat Badan Publik Informatif Lingkup Eselon II Kementan** dengan nilai 96,3. Hasil penilaian tahap pertama tersebut juga menempatkan PSIPKH sebagai Badan Publik Informatif peringkat I di lingkup BSIP.

Penilaian tahap kedua dilaksanakan kegiatan **Visitasi/Wawancara** kepada badan publik yang mendapatkan predikat Badan Publik Informatif yang dilakukan oleh Biro Humas Kementan bersama dengan Komisi Informasi Publik RI.



Gambar 5. Hasil Penilaian Tahap I SAQ Lingkup Kementan

Penilaian tahap kedua **Visitasi dan Wawancara** dilakukan oleh PPID Utama beserta Tim Komisi Informasi Pusat RI mengunjungi PSIPKH pada Selasa, 14 November 2023. Kegiatan dibuka oleh Kepala PSIPKH Dr. drh. Agus Susanto, M.Si yang menyebutkan Penilaian menjadi penting karena dengan adanya penilaian ini menjadi motivasi untuk PSIPKH lebih maju dan menjadi lebih baik.

Tim PPID Utama yang diwakili oleh Ketua Kelompok Pengelolaan Informasi Publik Erwin Zulkarnaen menyampaikan hasil Penilaian Tahap Pertama Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023, PSIPKH sudah berada di tahap unit kerja yang informatif di Lingkup Kementerian Pertanian dengan nilai 96,3 dimana tahun sebelumnya PSIPKH/Puslitbangnak berpredikat "Unit Kerja Menuju Informatif" dengan nilai 88,75. Sehubungan dengan hal tersebut PSIPKH diikutkan dalam penilaian kedua yaitu **Visitasi Lokasi dan Wawancara Pimpinan Unit kerja**. Tim Juri yang hadir yaitu Ibu



Tya Tirtasari (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat dari 2010-skrng) dan Dr. Muhammad Yasin (Dosen UI; Pemerhati keterbukaan informasi publik; S3 bidang keterbukaan informasi publik). dan turut hadir tim pendamping dari PPID Pusat yaitu Erwin Zulkarnaen, Wahyu Indarto, Mufrida Irfayani, S.I.Kom, M.Kom, dan Sulastri, SE.



Gambar 6. Visitasi dan Wawancara Badan Publik Informatif PSIPKH TA 2023

#### **g. Rapat Koordinasi PPID Lingkup Kementan dan Penganugerahan KIP 2023**

Kementerian Pertanian mendapatkan penghargaan kategori kementerian terbaik dari Komisi Informasi Pusat dalam rangka “Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023”. Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan koordinasi dan komitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, Kementerian Pertanian RI (PPID Utama) menyelenggarakan Rapat Koordinasi PPID lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023 sekaligus Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.

Rakor dilaksanakan secara *hybrid* dari IPB International Convention Center yang diikuti oleh PPID Pelaksana lingkup Kementan RI. Acara dibuka langsung oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri dan dilanjutkan

diskusi panel. Sesi pertama diskusi panel oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik dan Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik Imam Wahyudi serta dimoderatori Ketua Kelompok Pengelolaan Informasi Publik Erwin Zulkarnaen.

Acara dilanjutkan dengan Penganugerahan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2023 sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Dalam laporan pengantarnya, Kuntoro Boga Andri memaparkan setidaknya 5 aspek yang dinilai, yaitu : Penggunaan portal PPID dalam pengelolaan dan pelayanan permohonan informasi publik; dan Sarana dan prasarana penunjang. Hal ini menunjukkan komitmen unit kerja/ unit pelaksana teknis dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Didukung dengan kinerja pengelolaan informasi publik dan kehumasan yang tinggi. Dalam ajang ini, Kementan melibatkan 11 tim penilai, antara lain Prof. Bustanul Arifin, Prof. Tjipta Lesmana, Ujang Kamarudin, Ketua KIP, dan para penggiat keterbukaan informasi.

PSIPKH mendapatkan peringkat ke-6 Badan Publik Informatif Eselon II Lingkup



Kementan dalam malam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik. Tahap penilaian pertama, PSIPKH mendapatkan peringkat ke-3 tingkat eselon II lingkup Kementan namun setelah kegiatan visitasi dan wawancara (penilaian tahap II) PSIPKH mendapatkan peringkat ke-6 Eselon II Lingkup Kementan (peringkat I lingkup BSIP).

Acara malam penganugerahan KIP yang dilaksanakan pada 15 Desember 2023 di IPB Convention Center dihadiri oleh Kepala PSIPKH Dr. drh. Agus Susanto, M.Si, Ketua Kelompok PHSI Hasanatun Hasinah, S.Pt, MP beserta Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil SIPKH Nandi Hendriana, S.T, M.Kom dan Petugas PPID PSIPKH Bayu Arta Ramadhan, S.Pt.



Gambar 7. Pemingkatan dan Malam Penganugerahan KIP Lingkup Kementan

#### 4. Maklumat Layanan PPID PSIPKH

Proses pelayanan informasi publik di PSIPKH telah dilaksanakan sesuai SOP dan terintegrasi antar petugas untuk pelayanan yang optimal dan prima serta mempunyai tujuan diantaranya untuk meningkatkan kemampuan petugas dengan cara bagaimana pelayanan harus diberikan.

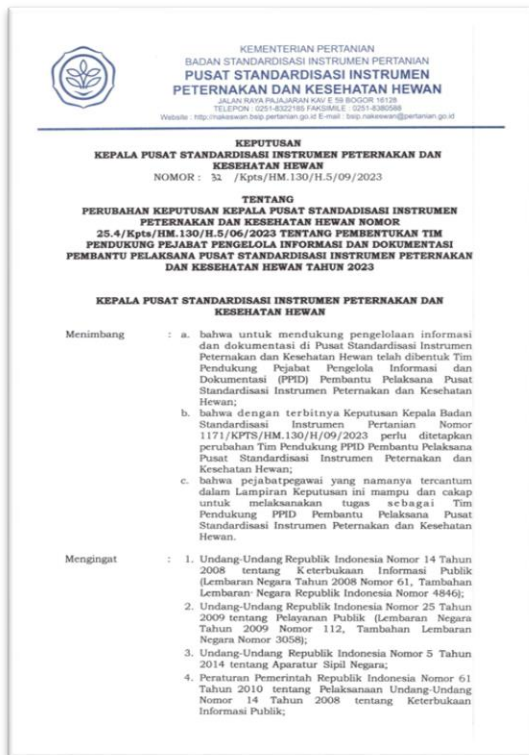


PSIPKH memiliki Motto Pelayanan PPID **“Ternak Unggul Rakyat Makmur”** dengan harapan bahwa dengan tersampainya informasi terkait peternakan di tingkat petani peternak atau masyarakat umum dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia melalui sektor peternakan.

Maklumat PPID PSIPKH **“Kami, Pegawai Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini,**

**kami siap menerima sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.**

## 5. SDM dan Anggaran PPID PSIPKH



Tim Pendukung PPID PSIPKH TA 2023 diisi oleh beberapa anggota yang kompeten sesuai jabatan fungsionalnya dalam mendukung pelayanan publik PSIPKH. Oleh karena itu diperlukan pelatihan dan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi petugas Unit Pelayan Publik (UPP) yang dapat bekerja secara terjadwal namun tetap dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab sehari-harinya di masing-masing bagian. Oleh karenanya, petugas UPP perlu dibekali dengan *training service of excellence*. Kriteria petugas UPP juga akan distrukturkan. Salah satu yang menjadi kriteria umum diantaranya yaitu: Kriteria memiliki pengetahuan kelembagaan/tusi UK/UPT; Berpenampilan rapi, bertutur sopan serta memiliki integritas dan kejujuran yang baik.

PSIPKH membentuk Tim Pendukung PPID ditetapkan oleh SK Kepala PSIPKH Nomor No. 32/KPTS/HM.130/H.5/09/2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) Nomor 25.4/Kpts/HM.130/H.5/06/2023 tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan 2023.

Melalui ketetapan tersebut ditunjuk Koordinator Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen PKH Hasanatun Hasinah, S.Pt, MP sebagai Ketua Tim Pendukung PPID PSIPKH.



Lampiran Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan  
 Nomor : SK /Kpts/HM.130/H.5/09/2023  
 Tanggal : 9. September 2023

**SUSUNAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2023**

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam tim
1.	Hasanaton Hasinah, S.Pt. MP. Ptt. Koordinator Kelompok Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua Tim
2.	Ir. Narta, MS Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3.	Drh. Hf Syarifah Munawaroh Koordinator Program Evaluasi	Anggota
4.	Nandi Hendriana, ST. M.Kom. Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
5.	Zuratih, S.Pt, M.Si Ketua Tim Kerja Evaluasi Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
6.	Drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si Ketua Tim Kerja Program Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7.	Yunus Sukmana, SH Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
8.	Sudrajat, SE. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	Anggota
9.	Drh. Eko Kardiyanto Anggota Tim Kerja Sinergi Pemanfaatan Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
10.	Sepdrian Dwikiranana Putra, S.Kom. Pranata Komputer Pertama	Anggota
11.	Febri Mundani A.Md.Komp. Calon Pranata Komputer Terampil	Anggota

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam tim
12.	Rahmawati Ebianora Pul Pranata Humas Terampil	Anggota
13.	Pringggo Pandu Kusumo, A.Md. Pustakawan Terampil	Anggota
14.	Ety Sugiarti, A.Md. Arsiparis Penyelia	Anggota
15.	Sudarto, SH Anggota Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
16.	Nur Rohani, SE Anggota Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	Anggota
17.	AhF Risky Zulkaernain, A.Md.Ak. Anggota Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	Anggota
18.	Bayu Arta Ramadhan, S.Pt Anggota Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota

KEPALA PUSAT  
  
 AGUS SUSANTO  
 NIP. 49919201 280212 1 002

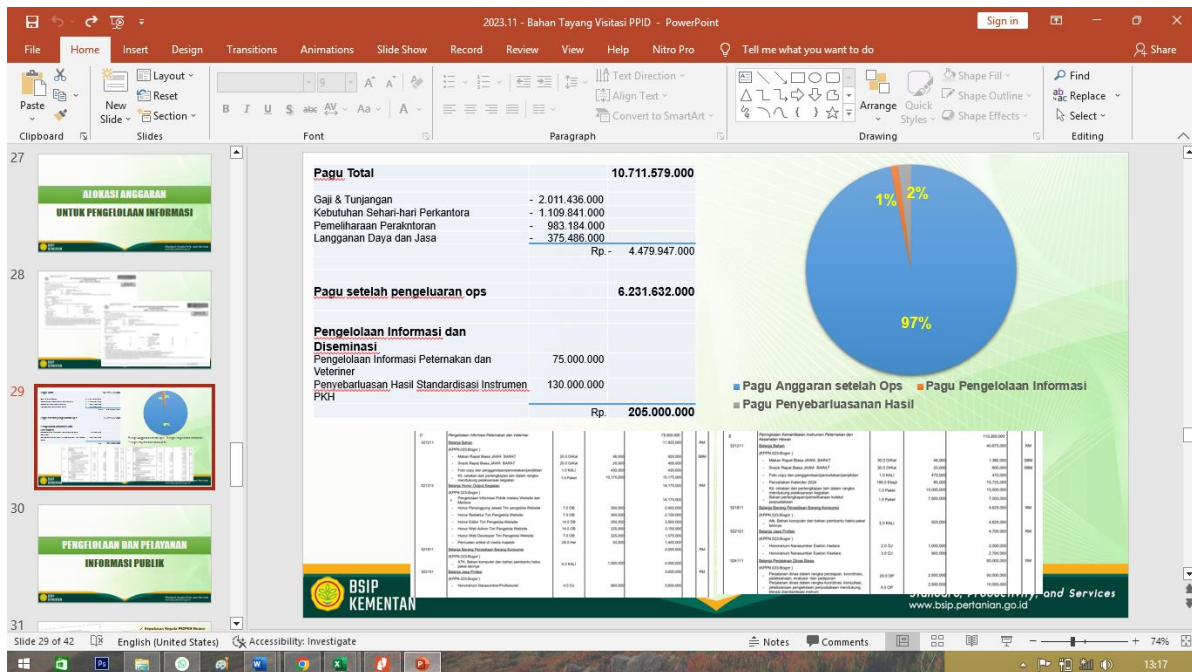
Gambar 8. SK Kepala PSIPKH Tim Pendukung PPID PSIPKH TA 2023



Gambar 9. Petugas yang ramah dan sigap PSIPKH

Kegiatan pengelolaan PPID di PSIPKH tahun 2023 telah dialokasikan dan tercantum dalam DIPA PSIPKH TA 2023 yang melekat pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Diseminasi pada kelompok kerja Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

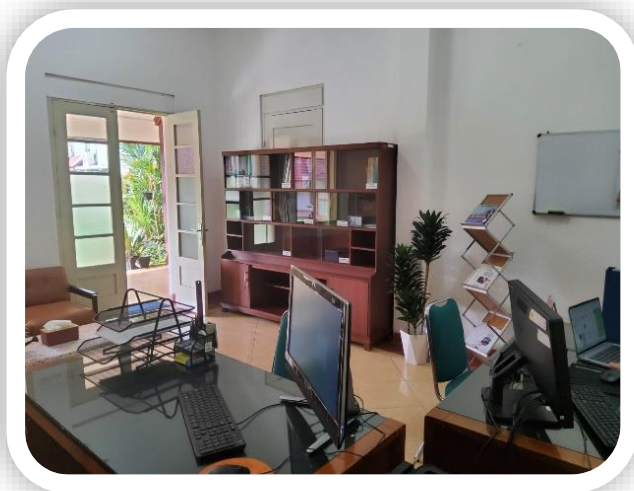
Anggaran kegiatan PPID yang telah dipersiapkan oleh PSIPKH sebesar Rp. 205.000.000,- dengan persentase sekitar 3 % dari pagu total anggaran PSIPKH sebesar Rp. 10.711.579.000.



Gambar 10. Alokasi Anggaran PPID PSIPKH TA 2023

## 6. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah pelayanan informasi publik yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, alur tata



cara permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik. Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan sudah disediakan guna untuk kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan.

Sarana dan prasarana penunjang bagi layanan informasi PPID di PSIPKH telah dipersiapkan sejak 2014 dan setiap tahun terus diperbaiki dan dilengkapi untuk kenyamanan pengunjung/pemohon informasi. PSIPKH telah menyediakan ruang layanan informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh pengunjung. PSIPKH juga telah menyediakan denah lokasi

dan jalur evakuasi di lingkungan PSIPKH dalam mempermudah akses pengunjung/pemohon informasi. Selain itu PSIPKH juga telah menyediakan akses ramah disabilitas di lingkungan PSIPKH dengan menyediakan kursi roda, jalur ramah disabilitas, toilet serta lokasi drop off disabilitas maupun lokasi parkir kendaraan untuk disabilitas.



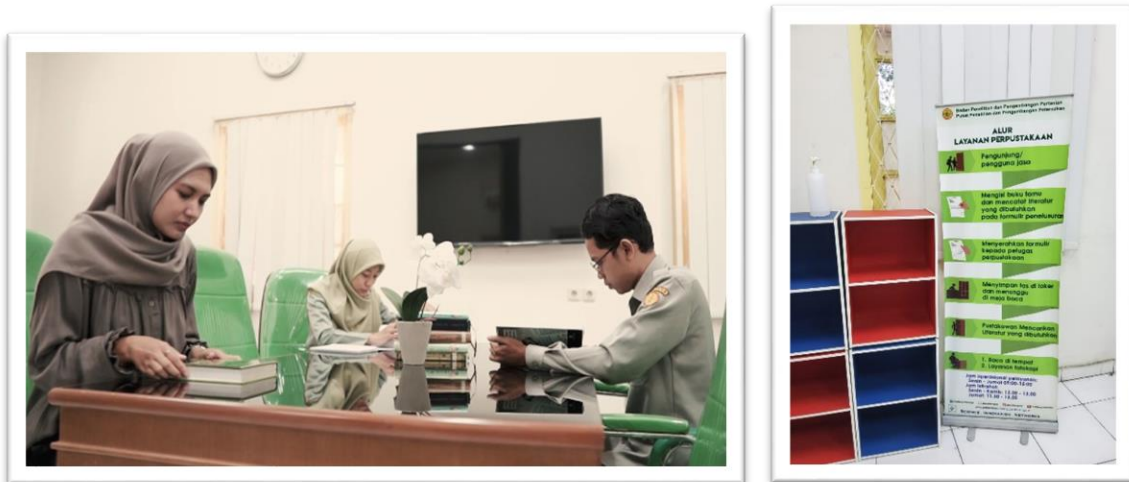
Gambar 11. Ruang Layanan Informasi Publik PSIPKH



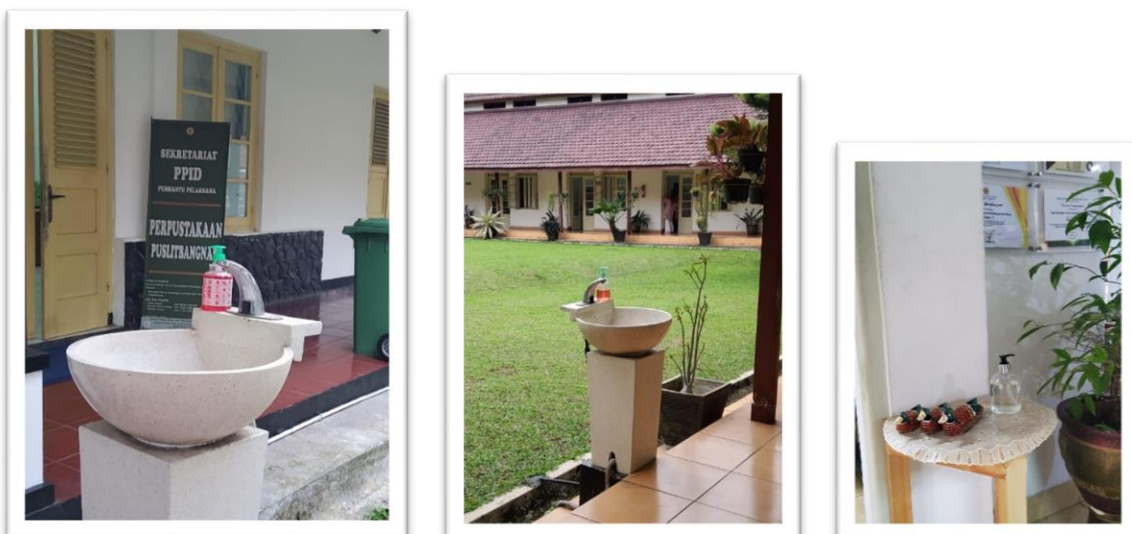
Gambar 12. Counter Desk Informasi Layanan Publik



Gambar 13. Maklumat Pelayan Serta Papan Informasi Digital PSIPKH

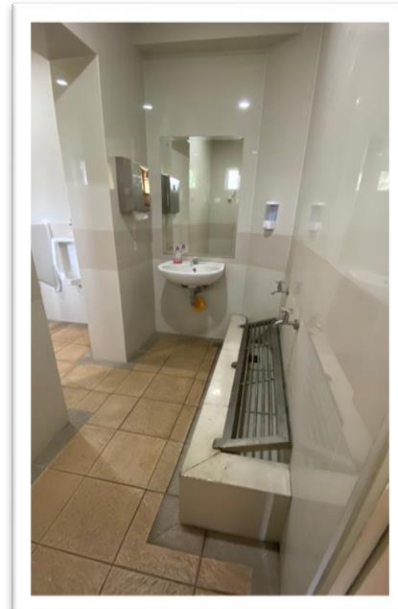
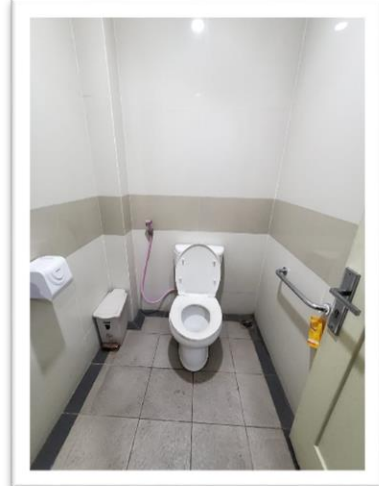


Gambar 14. Ruang Baca Perpustakaan dan loker pengunjung PSIPKH



Gambar 15. Sarana sanitasi dan hygiene di seluruh area PSIPKH





Gambar 16. Sarana dan Prasarana Ramah Disabilitas di PSIPKH



Gambar 17. Peralatan dan petunjuk saat terjadi bencana alam



Gambar 18. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik PSIPKH TA 2023



Gambar 19. Sertifikat dan Penghargaan yang Telah diraih PSIPKH

## 7. Laporan Informasi Publik PSIPKH TA 2023

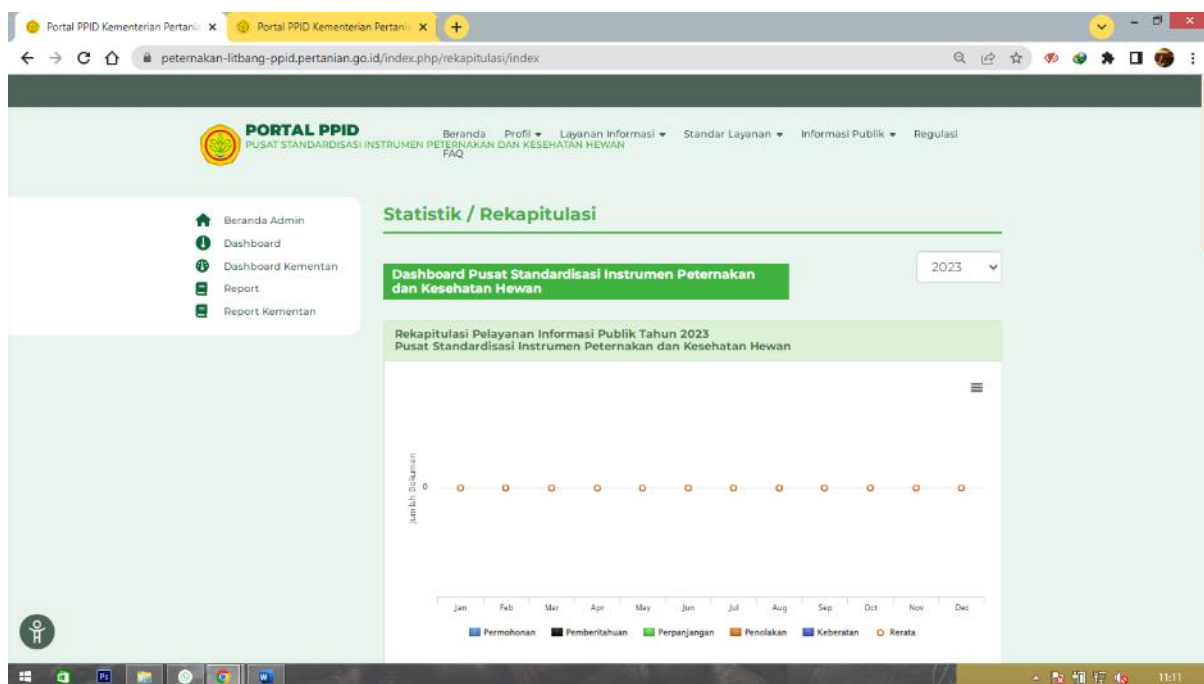
### a. Rekapitulasi Permohonan PPID

Jumlah pemohon informasi publik yang diterima oleh PSIPKH selama periode Januari – Desember TA 2023 sebanyak NIHIL atau tidak terdapat permohonan. Rekapitulasi permohonan informasi Publik (Permohonan PPID) disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Informasi Permohonan Informasi Publik

**REKAPAN PERMOHONAN INFORMASI (PPID) PSIPKH TA 2023  
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2023**

No	Bulan	Pemohon	Tanggal Permohonan	Mekanisme Permohonan	Informasi Yang Diminta	Pelayanan Permohonan (Diberikan/Ditolak)	Status Permohonan
1	Januari	-	-	-	-	-	NIHIL
2	Februari	-	-	-	-	-	NIHIL
3	Maret	-	-	-	-	-	NIHIL
4	April	-	-	-	-	-	NIHIL
5	Mei	-	-	-	-	-	NIHIL
6	Juni	-	-	-	-	-	NIHIL
7	Juli	-	-	-	-	-	NIHIL
8	Agustus	-	-	-	-	-	NIHIL
9	September	-	-	-	-	-	NIHIL
10	Oktober	-	-	-	-	-	NIHIL
11	November	-	-	-	-	-	NIHIL
12	Desember	-	-	-	-	-	NIHIL



Gambar 20. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik TA 2023

Rekapitulasi pemohon informasi publik unit kerja lingkup PSIPKH pada tahun 2023 selama bulan Januari – Desember 2023 pada satker BPSI UAT, LPSI Ruminansia Besar, dan LPSI Ruminansia Kecil didapatkan hasil NIHIL permohonan informasi. Rekapitulasi permohonan informasi Unit Kerja Lingkup PSIPKH TA 2023 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan IP Satker Lingkup PSIPKH

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik <b>BPSI UAT</b> TA 2023					Ket
		Silayan Online	Email	Whatsapp	On visit	Surat	
1	Januari	0	0	0	0	0	NIHIL
2	Februari	0	0	0	0	0	NIHIL
3	Maret	0	0	0	0	0	NIHIL
4	April	0	0	0	0	0	NIHIL
5	Mei	0	0	0	0	0	NIHIL
6	Juni	0	0	0	0	0	NIHIL
7	Juli	0	0	0	0	0	NIHIL
8	Agustus	0	0	0	0	0	NIHIL
9	September	0	0	0	0	0	NIHIL
10	Oktober	0	0	0	0	0	NIHIL
11	November	0	0	0	0	0	NIHIL
12	Desember	0	0	0	0	0	NIHIL

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik <b>LPSI RB</b> TA 2023					Ket
		Silayan Online	Email	Whatsapp	On visit	Surat	
1	Januari	0	0	0	0	0	NIHIL
2	Februari	0	0	0	0	0	NIHIL

3	Maret	0	0	0	0	0	NIHIL
4	April	0	0	0	0	0	NIHIL
5	Mei	0	0	0	0	0	NIHIL
6	Juni	0	0	0	0	0	NIHIL
7	Juli	0	0	0	0	0	NIHIL
8	Agustus	0	0	0	0	0	NIHIL
9	September	0	0	0	0	0	NIHIL
10	Oktober	0	0	0	0	0	NIHIL
11	November	0	0	0	0	0	NIHIL
12	Desember	0	0	0	0	0	NIHIL

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik <b>LPSI RK TA 2023</b>					Ket
		Silayan Online	Email	Whatsapp	On visit	Surat	
1	Januari	0	0	0	0	0	NIHIL
2	Februari	0	0	0	0	0	NIHIL
3	Maret	0	0	0	0	0	NIHIL
4	April	0	0	0	0	0	NIHIL
5	Mei	0	0	0	0	0	NIHIL
6	Juni	0	0	0	0	0	NIHIL
7	Juli	0	0	0	0	0	NIHIL
8	Agustus	0	0	0	0	0	NIHIL
9	September	0	0	0	0	0	NIHIL
10	Oktober	0	0	0	0	0	NIHIL
11	November	0	0	0	0	0	NIHIL
12	Desember	0	0	0	0	0	NIHIL

**b. Rekapitulasi Waktu Pelayanan dan Jam Pelayanan Informasi Publik**

Meskipun PSIPKH tidak memiliki permohonan informasi publik pada Januari-Desember 2023 namun PSIPKH tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan PSIPKH berupa pelayanan informasi konsultasi inovasi teknologi serta pelayanan perpustakaan. Dalam melakukan pelayanan tidak menargetkan berapa lama pelayanan itu dilakukan karena PPID Utama telah menentukan waktu pelayanan harian, tetapi lebih kepada kepuasan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

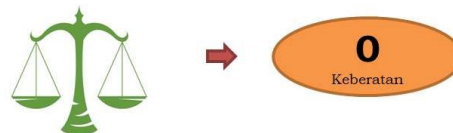
Waktu layanan di unit kerja lingkup PSIPKH telah dipublikasikan kepada pengguna layanan pada ruang pelayanan informasi dan sudah di sosialisasikan pada saat kegiatan *public hearing* seperti yang dicantumkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 21. Waktu Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementan

### c. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Keberatan

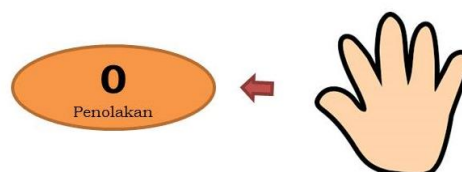
Selama Periode Januari – Desember 2023 Unit Kerja Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) tidak menerima permohonan keberatan dalam permohonan informasi publik. Hal ini merupakan indikator kepuasan masyarakat selama permintaan informasi publik telah dilayani dengan baik dan mendapatkan apa yang dikehendaki dalam informasi.



Gambar 22. Rekapitulasi Nihil Waktu Pelayanan Keberatan

### d. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

Selama Periode Januari – Desember 2023 PSIPKH dan UPT Lingkup PSIPKH tidak menerima penolakan permohonan informasi publik. Permohonan informasi yang telah diterima oleh PSIPKH beserta UPT Lingkup PSIPKH dapat dipenuhi dengan baik dan tidak ada pengajuan penolakan dari pemohon.



Gambar 23. Rekapitulasi Nihil Penolakan Permohonan

**e. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia Dan Pekerjaan**

Jumlah Pemohon berdasarkan usia dan pekerjaan terkait informasi publik yang telah diterima PSIPKH dengan UPT Lingkup PSIPKH NIHIL pemohon informasi.



Gambar 24. Rekapitulasi Nihil Pemohon Informasi Berdasarkan Usia Dan Pekerjaan

**f. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan**



Gambar 25. Rekapitulasi Nihil Permohonan IP Berdasarkan Pengelompokan

**8. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi**

Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup PSIPKH diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan perlu persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan dalam fasilitas pendukung yang memadai seperti sarana pendukung, SDM yang memiliki pengetahuan kelembagaan dan pengetahuan teknis yang memadai serta anggaran. Dengan demikian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih terkelola dengan baik.

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah belum semua pejabat/ pegawai memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun informasi yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Untuk itu Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan terkait informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon perlu dilakukan di sosialisasikan kepada pegawai secara terus-menerus.

Belum maksimalnya operasional ruang layanan PPID, sarana dan prasarana maupun SDM yang khusus menangani layanan informasi publik, serta kurang pemahaman para pelaksana tentang keterbukaan informasi publik.

Formulir layanan informasi belum diaktifkan dengan pengisian dari setiap pemohon yang datang, sehingga pencatatan klasifikasi layanan informasi publik yang diinginkan pemohon dapat diklasifikasikan dengan baik. Pedoman pelayanan UPP juga perlu disusun untuk dapat mempermudah pelaksana UPP dalam melaksanakan tugasnya dan tentunya sosialisasi mengenai Pedoman ini juga perlu disertai dengan praktek untuk mengakses informasi publik yang sudah tercantum didalam intranet PSIPKH..

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan PSIPKH.

## **9. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi**

Selama Tahun 2023, Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan juga melakukan kolaborasi inovasi layanan informasi untuk inovasi layanan kepada stakeholder. Beberapa aplikasi yang telah di dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

- Aplikasi kearsipan dinamis yaitu SRIKANDI;
- Aplikasi Permohonan Layanan Virtual Meeting;
- Aplikasi Permohonan Layanan Troubleshooting TIK;
- Aplikasi permohonan peminjaman ruangan rapat yaitu SIRAPAT;
- Aplikasi permohonan pengajuan cuti yaitu SICUTI;
- Aplikasi permohonan peminjaman kendaraan dinas yaitu SIJAMBIL;
- Aplikasi sistem aplikasi gaji berkala yaitu SIGAP;
- Aplikasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi yaitu SIPEMONEV;
- Aplikasi monitoring tenaga PPNPN yaitu SITEKON;
- Aplikasi pencatatan kunjungan tamu yang ada di ruang resepsionis yaitu SITAMU;
- Aplikasi pencatatan pengajuan pengaduan online melalui silayan online;
- Aplikasi pengaduan masyarakat melalui google form yang ada di website, QR code, dan form;
- Aplikasi survey kepuasan masyarakat dengan google form yang ada di website, QR code, dan form;
- Aplikasi penyimpanan data dan dokumen PSIPKH yaitu Nextcloud.



## **10. Rencana Kegiatan PPID PSIPKH Tahun 2024**

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka PSIPKH telah berkomitmen untuk menyediakan anggaran, penyiapan sarana dan prasarana pelayanan serta selalu memperbaiki Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk pelayanan informasi prima kepada masyarakat, pemangku kepentingan maupun semua pihak yang memerlukan. Terkait hal tersebut, untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik telah di susun standar pelayanan publik (SPP) PSIPKH.

## PENUTUP

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana lain terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu: panduan permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam sistem intranet PSIPKH.

Pelayanan informasi publik di PSIPKH akan lebih digiatkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

Proses pelayanan informasi publik di PSIPKH telah dilaksanakan sesuai SOP secara terintegrasi dan sesuai maklumat pelayanan serta senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan teknis tim pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan prima.

Bogor, 03 Januari 2024

Ketua Kelompok PHSI PSIPKH

selaku Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana

Balitbangtan,



Hasnatun Hasinah, S.Pt, MP

NIP. 197204091999032001